

JIWA, SEMANGAT NASIONALISME TOKOH TRIPAMA

Marjono

Institut Seni Indonesia Surakarta
Jl. Ki Hadjar Dewantara No. 19 Ketingan, Jebres, Surakarta, 57126

ABSTRAK

Jiwa, semangat kepahlawanan (nasionalisme) yang tersimpul dalam tokoh Tripama menjadi suatu teladan yang patut dimiliki oleh seorang prajurit. Jiwa pengabdian Sumantri, Karna dan Kumbakarna sebagai prajurit telah ditunjukkan dalam bentuk kerelaan berkorban demi bangsa dan negara dengan tanpa pamrih. Sumantri merupakan tokoh yang konsekuen dan energik sehingga mampu mencapai tataran tertinggi dalam pengabdian di Maespati dan rela mengorbankan jiwanya untuk kepentingan Maespati. Basukarna (Karna) adalah tokoh yang cerdas, bersemangat tinggi dan teguh dalam memperjuangkan prinsip hidup. Ia rela mengorbankan jiwa dan raga untuk bangsa dan negara Ngastina melawan saudaranya sendiri seibu tanpa ragu. Tokoh Kumbakarna berjiwa luhur (berbudi luhur) yang lebih mengedepankan kebenaran sebagai idealismenya, meskipun dalam membela bangsa dan negara sudah terlambat dalam mana negara sudah dalam keadaan darurat, tetapi tetap berjiwa mempertahankan eksistensi bangsa dan negara Ngalengka bukan semata-mata membela kehendak rajanya.

Kata kunci: jiwa, semangat, nasionalisme.

ABSTRACT

Soul, nationalism implied in the character of Tripama becomes a model which is necessary to have by a warrior. A soul of devotion of Sumantri, Karna, and Kumbakarna as warriors have been shown in the form of a willingness to sacrifice for the nation and country without expecting any reward. Sumantri is a character who is consistent and energetic so that he is able to reach the highest level in his devotion in Maespati and is willing to sacrifice his soul for Maespati. Basukarna (Karna) is a character who is intelligent, having a high spirit, and tenacious in fighting for the life principle. He is willing to sacrifice his body and soul for the nation and country of Ngastina in fighting his own sibling without any doubts. The character of Kumbakarna is virtuous who is prioritize truth as his idealism, although it is too late in defending his nation and country in which the country is in the state of emergency. Yet, he stands still in defending the existence of Ngalengka, not merely defends his King's wish.

Keywords: soul, spirit, nationalism.

A. Pengantar

Dalam dunia wayang, Tripama atau serat Tripama yang ditulis oleh KGPAAMangkoenegara IV adalah Pupuh Dhadhanggula yang berisi semacam tauladan (*wewarah*) atau petunjuk untuk para prajurit (*bhayangkarining negari*) untuk dapat meniru semampunya sikap, semangat dan jiwa bahkan kepribadian yang dimiliki oleh tokoh Sumantri, Kumbakarna dan Basukarna (Karna) sebagai ksatriya (*prajurit*) dalam pengabdian kepada negara (*raja*) dan bangsanya. Pengabdian kepada negara dan bangsa telah ditunjukkan melalui pengorbanan jiwa dan raga semata-mata sebagai bentuk kesetiaan dan darma baktinya sebagai seorang ksatriya (*prajurit*). Dalam konteks ini semangat, jiwa dan sikap yang terjelma dalam tokoh Tripama merupakan gambaran

semangat dan jiwa nasionalisme yang sudah semestinya dimiliki oleh setiap warga negara terutama prajurit, sehingga karena itu pengabdian kepada negara dan bangsa bukan semata-mata karena perintah, takut pada pimpinan, kepentingan tertentu, tetapi memang sudah menjadi suatu panggilan hati nurani, suatu kewajiban yang tidak bisa dipungkiri untuk rela berkorban demi bangsa dan negara serta dilakukannya dengan sepenuh hati.

Masyarakat Jawa umumnya tidak ragu lagi dengan dunia wayang disamping wayang sebagai kebudayaannya juga merupakan bentuk ekspresi dari kehidupan manusia sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat bahkan negara. Tidak bisa dipungkiri bahwa dunia wayang mengandung banyak aspek yang bisa ditelusuri dari berbagai disiplin dan bidang kehidupan manusia bahkan dari sisi

keagamaan. Dalam dunia dakwah misalnya, wayang menjadi alat dakwah yang sangat ampuh (Effendy Zarkasi, 1977). Wayang adalah warisan nenek moyang yang sebagian diciptakan dan disempurnakan oleh para Wali, sehingga isinyapun mengandung unsur-unsur ke-Islaman walaupun isi ceritanya bukan berasal dari Islam. Dalam hubungan ini wayang menjadi media untuk menyampaikan pesan-pesan Islam yang dikemas menyatu dengan cerita, sehingga bersamaan dengan alur cerita pesannya dengan mudah dapat dipahami oleh audien.

Tulisan mengenai jiwa, semangat nasionalisme tokoh Tripama merupakan suatu tinjauan dalam perspektif psikologi politik, yakni menyangkut kesadaran berbangsa dan bernegara yang direalisasikan dalam bentuk kerelaan berkorban untuk kepentingan nusa dan bangsa dengan tanpa keraguan. Perspektif psikologi mengutip pikiran Plato (Sumadi Suryabrata, 1982: 60) bahwa jiwa manusia dibedakan dalam tiga bagian, yaitu: pertama, akal budi atau pikiran atau logos yang berkedudukan di kepala, bagian ini dikaitkan dengan kebijaksanaan atau kearifan. Kedua, kemauan atau kehendak, berlokasi di dada dikaitkan dengan keberanian dan ketiga, nafsu atau gairah atau dikenal dengan hasrat, berkedudukan di perut dikaitkan dengan penguasaan diri. Berkaitan dengan tiga bagian jiwa tersebut Plato mengemukakan adanya tiga macam kebajikan, yaitu: kebijaksanaan, keberanian dan penguasaan diri. Sejalan dengan pikiran Plato, Kartini Kartono (Kartini Kartono, 1980: 53) menjelaskan bahwa ketiga bagian jiwa manusia dan ketiga kebajikan tersebut menjuruskan manusia kepada kebenaran dan keadilan, dalam mana adanya dominasi akal, kemauan dan nafsu, sehingga munculah pembagian tipologi manusia atas dasar psikologis, yaitu: tipe berakal budi, yakni orang yang terutama dikuasai oleh pikir, tipe kemauan, ialah orang yang terutama dikuasai oleh kemauan dan tipe nafsu atau hasrat, ialah orang yang terutama dikuasai oleh karsa. Berdasar pembagian tipologi manusia, Plato membagi fungsi rakyat dalam sesuatu negara, yakni: pertama, tipe berakal budi kedudukan bagi golongan pemimpin pemerintahan (para penguasa); kedua, tipe kemauan kedudukan golongan tentara, pengawal dan pegawai negeri, dan ketiga, tipe hasrat atau nafsu kedudukan golongan pekerja tangan (pekerja, buruh). Berorientasi pada pikiran Plato dengan teori tipologi manusia dapat dipakai untuk mendekati jiwa, semangat nasionalisme tokoh tripama yang ditunjukkan dalam pengabdianya bagi negara dan bangsa. Bagaimana kedudukan dan peran tokoh Sumantri, Karna dan Kumbakarna yang penuh

semangat rela berkorban untuk negara dan bangsa, yang semuanya itu dilakukannya sebagai bentuk panggilan dan kewajiban kesatriaan.

Dalam kosep politik dikenal teori politik yang mempunyai dasar moral untuk menentukan norma-norma politik disebut *teori valuational* dan teori yang menggambarkan dan membahas fenomena dan fakta politik dengan tidak mempersoalkan norma-norma atau nilai, dengan kata lain lebih bersifat deskriptif dan komparatif dikenal dengan *teori non valuational* (Miriam Budiardjo, 1985: 30-31). Dalam hubungan ini tulisan jiwa, semangat nasionalisme tokoh Tripama lebih bersifat deskriptif yang berusaha menjelaskan fakta kehidupan politis tokoh Tripama sedemikian rupa sehingga dapat disistematisir dan disimpulkan untuk memberi gambaran secara konkrit menurut interpretasi penulis.

Untuk mendukung pendeskripsian fenomena peran dan kedudukan tokoh Tripama dalam konteks jiwa dan semangat nasionalisme dilakukan melalui metode deskriptif interpretatif, yakni melukiskan atau menjelaskan fakta atau keterangan yang terjelma dalam diri tokoh Sumantri, Karna dan Kumbakarna sebagaimana tersimpul dalam Serat Tripama oleh KGPAA Mangkunagara IV yang hasilnya merupakan deskripsi yang melibatkan interpretasi penulis. Oleh karena itu kajian pustaka merupakan kegiatan prinsipil dan menjadi langkah utama untuk mendapatkan sumber pendukung guna mendeskripsikan kajian.

Jiwa, semangat nasionalisme sudah sewajarnya tumbuh dan terpelihara dalam setiap diri warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan harus ditingkatkan secara terus-menerus tidak hanya dalam kondisi darurat tetapi dalam kondisi damai pun kesadaran berkebangsaan terus dipupuk. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara terdapat ikatan sosial yang disebut solidaritas, sehingga karena itu dirinya merasa sebagai bagian dari kesatuan yang diberi nama bangsa. Bagi suatu bangsa, nasionalisme merupakan jiwa kebangsaan yang memang mutlak harus ada mengingat bangsa tersebut terdiri dari berbagai golongan mungkin berupa etnis, agama, kebudayaan. Sebagaimana kita jumpai dalam negara Indonesia yang bersuku-suku, beragama-agama, berkebudayaan-kebudayaan, berbahasa-bahasa dan bahkan berideologi lokal. Dalam kondisi yang beragam itu terbentuklah tekad untuk mewujudkan kesatuan Indonesia yang kemudian terakumulasi dalam bentuk Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Dengan semangat Sumpah Pemuda mengalirlah semangat perjuangan masyarakat bangsa Indonesia yang kemudian menjadi

pergerakan nasional dengan tujuan yang jelas dan konkrit ialah terbentuknya negara nasional yang bernama Indonesia Merdeka. Sejenak melongok kebelakang bahwa lahirnya negara nasional (Indonesia merdeka) tidak bisa dilepaskan dari jiwa nasionalisme yang telah tumbuh dan berkembang pada diri bangsa Indonesia yang ternyata telah dirintis oleh para cendekiawan atau para kaum terpelajar melalui organisasi sosial politik ialah Budi Utomo 1908. Meskipun Budi Utomo pada awal berdirinya bersifat lokal, kedaerahan ialah Jawa, tetapi bagi kaum pemuda menjadi suatu wadah pergerakan untuk melakukan perjuangan dengan tujuan merdeka.

Membicarakan nasionalisme sama dengan membicarakan sejarah perkembangan organisasi sosial politik, artinya perkembangan bentuk-bentuk solidaritas kelompok-kelompok sosial-ekonomi-budaya suatu waktu berkembang dari bentuk dan tahap sederhana ke bentuk yang lebih maju (katakanlah baru). Dalam kondisi seperti ini manusia yang secara kodrati adalah makhluk sosial selalu memerlukan interaksi dan hidup berkelompok. Hidup berkelompok senantiasa menyesuaikan diri dengan batas-batas alami dan ikatan primordial seperti kekerabatan, darah, dialektik, etnik, daerah, yang kemudian berkembang lebih lanjut karena manusia selalu melakukan hubungan-hubungan fungsional. Katakanlah dari bentuk kelompok sosial – ekonomi – budaya yang bernama keluarga berkembang menjadi ikatan kampung, marga dan kemudian menjadi ikatan teritorial yang lebih luas dan melawati batas-batas primordial dan alami ialah negara. Dimana pengalaman kolektif ialah sejarah kebersamaan dan kesamaan nasib menghasilkan dorongan yang kuat untuk perlunya dibentuk ikatan solidaritas yang lebih luas tidak terbatas dalam ikatan primordial. Itulah yang kemudian terbentuknya ikatan sosial yang paling kompleks dan makin luasnya kepentingan mereka yang dikenal dengan negara. Oleh karena itu mengenai terbentuknya negara banyak teori yang mengkajinya dari sudut pandang masing-masing, seperti misalnya teori perjanjian (Idup Suhady, 2009, hal.8-9) bahwa negara terbentuk karena perjanjian yang dibuat antara orang-orang yang semula hidup bebas terlepas satu sama lain tanpa ikatan kenegaraan dan kemudian mereka mengadakan perjanjian agar kepentingan mereka bersama dapat terpelihara, terjamin. Teori ini kemudian dikenal dengan teori kontrak sosial. Bagi bangsa Indonesia menerjemahkan perkembangan tentang terjadinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menyangkut beberapa hal: **pertama**, terjadinya NKRI merupakan suatu proses

yang tidak sekedar dimulai dari proklamasi, artinya perjuangan kemerdekaan mempunyai peran penting dalam pembentukan ide-ide dasar yang dicita-citakan ialah terbentuk negara nasional. **Kedua**, proklamasi baru mengantarkan bangsa Indonesia sampai kedepan pintu gerbang kemerdekaan, artinya proklamasi bukan berarti kita telah selesai bernegara, tetapi dengan proklamasi harus segera dilakukan kegiatan penting seperti pembentukan pemerintahan, adanya hukum dasar negar. **Ketiga**, keadaan bernegara yang dicita-citakan belum tercapai hanya dengan adanya pemerintahan, wilayah dan penduduk, tetapi harus diisi untuk menuju keadaan merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur. Merdeka ialah terwujudnya asas kebebasan (untuk bisa membangun rumah tangganya sendiri syaratnya harus merdeka) tidak ada campur tangan bangsa lain. Bersatu dimaksud ialah memiliki kesatuan dalam keseluruhan baik rakyat yang serba majemuk maupun wilayah (wadah bangsa) yang serba nusantara. Berdaulat dimaksud memiliki kekuasaan tertinggi yang tidak lagi berada di bawah kekuasaan bangsa lain, dan adil makmur dimaksud bahwa negara diperuntukkan rakyat, negara untuk rakyat, negara merealisasikan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. **Keempat**, terjadinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah kehendak seluruh rakyat bukan sekedar keinginan golongan. **Kelima**, adanya kekuatan religioitas sebagai wujud kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa, artinya kemerdekaan bangsa indonesia tidak bisa dilepaskan dari Karunia Tuhan Yang Maha Esa (Sumarsono dkk, 2001, hal.11-12).

Membahas wayang memang rasanya sama dengan membahas kehidupan manusia yang tidak ada habisnya sebagaimana perjalanan hidup manusia itu sendiri. Wayang sebagai hasil karya bangsa (masyarakat) Indonesia adalah karya seni yang sangat mangagumkan, ia dapat diinterpretasi, dipelajari, dianalisis menurut kepentingan bahkan dapat disesuaikan dengan alam pikiran kita sekarang. Namun perlu juga dipertimbangkan dalam hal menginterpretasi dunia wayang (dalam hal ini cerita) sedapat mungkin lebih mengedepankan aspek moral yang positif, mengingat wayang sebagai bentuk kisah hidup manusia yang dibawakan oleh tokoh-tokoh wayang hakikatnya juga merupakan ajaran moral, sehingga karena itu wayang sebagai karya seni dapat menjadi tuntunan terutama bagi generasi sekarang. Dalam mana tokoh-tokoh sebagai lambang kebaikan, kepahlawanan, keperwiraan, keutamaan, kebijaksanaan tidak dengan lugas melakukan perbuatan yang bertentangan dengan falsafah tokoh

itu sendiri. Meskipun diakui masing-masing pihak dapat memberikan gambaran, penilaian terhadap karakter tokoh antara dalam dan dangkal. Sebut saja dalam kisah wayang tokoh Basukarna (Karna) dilihat sepintas, perbuatan tokoh itu buruk memihak kepentingan Duryudana yang serakah mengabaikan kebenaran, keadilan, sombong dan yesmen, tetapi bila dilihat secara makna, lebih dalam akan terlihat baik, ia tokoh yang cerdas, tangguh dan konsekuen (*bahasa Jawa : mrantasi gawe*). Demikian juga bagi tokoh Tripama lainnya ialah Sumantri dan Kumbakarna, kita bisa memberikan gambaran secara konkrit sesuai dengan alam pikiran kita. Digambarkan bahwa Sumantri yang dikenal dengan nama Suwanda selain sebagai seorang satria yang memiliki kepribadian baik dapat juga dinilai sebagai tokoh yang ambisius yang mengejar posisi sosial (pangkat dan derajat) tinggi, demikian juga Kumbakarna merupakan tokoh yang selalu menuruti kehendaknya sendiri, idealis. Namun diluar penilaian tersebut pada diri ketiga tokoh tersebut memiliki sikap dan perilaku kepahlawanan, patriotik yang patut diteladani. Mereka bukan saja seorang militer (prajurit tangguh), tetapi juga memiliki jiwa nasionalis serta berbudi baik selalu mengedepankan perilaku utama (Ki Tentrem Warsena LC, Serat Tripama pupuh 1 – 7,tt). Dijelaskan juga dalam serat Tripama, oleh penulis ialah KGPAA Mangkunegara IV bahwa meskipun dalam konkritnya (lahiriah) tokoh Tripama itu kurang baik, tetapi pada dirinya memiliki tekad, sikap yang tidak berbeda dengan tokoh-tokoh yang memiliki jiwa keutamaan. Sebagaimana ditegaskan KGPAA Mangkunegara IV yang tertuang dalam bait ketujuh serat Tripama, kita bisa mengambil sebagian atau semampunya atas pengabdian ketiga tokoh Tripama (Ki Tentrem Warsena, op.cit : 20)

*Katri mangka sudarsaneng Jawi
pantes sagung kang para prawira
amirita sakadare
ing lelabuhanipun
hawya kongsi mbuang palupi
manawa tibeng nistha
ina esthanipun
sanadyan tekading buta
tan prabeda budi pandoming dumadi
marsudi ing kotaman*

Bila diartikan secara bebas “ketiga contoh itu merupakan teladan di Jawa yang pantas jikalau para prajurit dapat menghayati sekuasanya, dalam pengabdian terhadap (kerajaan), jangan sampai melalaikan contoh-contoh baik, jika jatuh kelembah

nista, hina, kemauannya, walaupun sentausanya budi baik tidak ada lain hendaknya berusaha sesuai dengan harkat hidup, berusaha dalam keutamaan”.

Jiwa, semangat nasionalisme yang tertanam pada diri tokoh Tripama dapat dikatakan seiring dengan konsep nasionalisme yang disampaikan Hans Kohn, 1961, bahwa nasionalisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan atau *nation-state*. Perasaan yang sangat mendalam akan suatu ikatan yang erat dengan tanah tumpah darahnya, adat tradisi setempat maupun penguasa resmi di daerahnya selalu ada sepanjang sejarah dengan kekuatan yang berbeda-beda (Hans Kohn dalam Teuku Ibrahim Alfian, 1998: 23). Selanjutnya Hans Kohn menegaskan bahwa nasionalisme adalah sentimen yang menganggap diri sebagai bagian dari komunitas yang anggota-anggotanya mengidentifikasi diri dengan seperangkat simbol, kepercayaan dan pandangan hidup serta memiliki kemauan untuk menentukan nasib bersama.

B. Pengertian Nasionalisme

Nasionalisme atau yang sering kita sebut dengan paham kebangsaan bukanlah barang jadi yang sudah selesai dan mandeg. Sebagai suatu paham, nasionalisme merupakan sesuatu yang terbuka berkembang untuk melayani tuntutan dan tantangan zaman agar tetap aktual dan efektif berfungsi bagi perkembangan suatu bangsa yang terus menerus ditantang oleh tuntutan-tuntutan pembaharuan (Kunto Wibisono Siswomihardjo, 1998: 8). Secara politik, nasionalisme merupakan kebangunan bangsa-bangsa terjajah sebagai reaksi terhadap kehadiran kolonialisme. Kolonialisme dipandang sebagai rangkaian daya upaya suatu bangsa untuk menaklukkan bangsa lain dalam segala aspek kehidupan. Oleh karena itu kolonialisme adalah dominasi politik yang cenderung menguasai wilayah dan eksploitasi ekonomi yakni penguasaan sumber ekonomi untuk mendukung kepentingannya serta penetrasi kebudayaan yakni pemaksaan unsur-unsur budaya kolonial dalam kehidupan masyarakat terjajah. Di Indonesia, mungkin juga di negara-negara berkembang seperti di Asia dan Afrika, nasionalisme merupakan suatu gerakan anti kolonial yang hasilnya dapat dinikmati setelah berakhirnya perang dunia kedua ialah kemerdekaan Indonesia tahun 1945, meskipun sebenarnya gerakan yang bernama nasionalisme sudah dimulai sejak awal abad 20 (Teuku Ibrahim Alfian, 1998: 32). Gottfried von Herder,

menyebutkan nasionalisme sebagai doktrin sudah lahir pada abad ke 18 di Jerman dan kemudian di Perancis (Moeljarto Tjokrowinoto 1998: 41). Teuku Ibrahim kembali menegaskan bahwa di dunia ketiga terutama di Asia-Afrika dan Amerika Latin berkembang satu tipe nasionalisme yang pada hakekatnya bermula dari gerakan anti kolonial, meskipun sebagian besar tercapai pada masa pasca perang dunia kedua.

Disatu sisi kolonial menimbulkan dampak negatif bagi penduduk jajahan, tetapi disisi lain tanpa sadar dan bahkan tanpa direncanakan kolonialisme ikut memberi andil menyemaikan benih-benih nasionalisme di wilayah koloninya. Pembangunan, katakanlah modernisasi yang dilakukan kolonialisme dengan dampak yang mengikutinya telah menghasilkan perubahan hampir disegala bidang kehidupan masyarakat terjajah, dan perubahan itulah yang sebenarnya berperan membangkitkan semangat dan jiwa nasionalisme. Sejarah telah mencatat Budi Utomo (Boedi Oetomo) yang berdiri tahun 1908 dipandang sebagai perintis kebangkitan nasional meskipun awal berdirinya masih bersifat kedaerahan dan lebih menonjolkan budaya Jawa, namun Boedi Oetomo menjadi penting untuk diingat karena menyangkut terbangunnya kesadaran nasional bangsa Indonesia.

Istilah nasionalisme secara etimologi berasal dari kata latin "*nation*" (kata benda "*natio*" dari kata kerja "*nasci*" yang berarti dilahirkan) yang berarti bangsa yang dipersatukan karena kelahiran (Noor MS Bakry, 2010: 83). Dalam perkembangannya arti tersebut telah berubah menurut ruang dan waktu serta disesuaikan dengan pemikiran penafsirnya. Lebih lanjut Ismaun menegaskan, secara fundamental nasionalisme timbul dari adanya "*national consciousness*", atau dengan istilah lain, nasionalisme adalah performalisasi dan rasionalisasi dari kesadaran nasional, dan kesadaran nasional inilah yang menumbuhkan *nation* dalam arti politik, yakni negara (Ismaun dalam Noor M S Bakry, 2010: 84). Kesadaran nasional mencerminkan adanya semangat kecintaan pada nusa dan bangsanya, semangat untuk memperjuangkan kepentingan bangsa dan negaranya, sehingga bisa dikatakan bersifat patriotik. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan Balai Pustaka, nasionalisme merupakan kesadaran keanggotaan di suatu bangsa yang secara potensi atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1994:684). Sejalan dengan pengertian

tersebut, James Coleman memberikan batasan nasionalisme dalam arti luas adalah suatu kesadaran untuk menjadi milik suatu bangsa atau suatu nasionalitas dan suatu hasrat sebagai sentimen nyata atau aktivitas, untuk menjamin atau mempertahankan kesejahteraan, kemakmuran dan integritas dan memaksimalkan otonomi politisnya (Moeljarto Tjokrowinoto, op.cit, 1998:43). Batasan ini ada persesuaian dengan batasan yang diberikan Guiberneu, nasionalisme adalah sentimen yang menganggap diri sebagai bagian dari suatu komunitas yang anggota-anggotanya mengidentifikasi diri dengan seperangkat simbol, kepercayaan dan pandangan hidup, dan yang memiliki kemauan untuk menentukan nasib atau takdir politik bersama (Teuku Ibrahim, op.cit: 30).

Merujuk pengertian di atas, nasionalisme mempunyai peran penting dalam mewujudkan kelangsungan hidup bangsa dan negara dimana dirinya menjadi bagian di dalamnya. Peran itu menempatkan nasionalisme sebagai suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan (*nation-state*). Dalam mana pada dirinya telah terjadi ikatan erat dengan negara sebagai ruang hidup maupun dengan kondisi sosial budaya yang telah ikut membentuk dirinya sebagai nasionalis (mampu mengatasi loyalitas dan solidaritas parokial). Karena itu dengan semangat nasionalisme yang tinggi akan mampu mengatasi berbagai ancaman atau kekuatan eksternal yang timbul sebagai akibat globalisasi seperti kekuasaan kolonial, pengaruh politik asing, liberalisasi ekonomi.

C. Akar Nasionalisme

Dalam hidup bersama setiap manusia selalu berada dalam lingkaran-lingkaran persekutuan hidup, baik dalam persekutuan kecil seperti keluarga kemudian desa, kampung dan bentuk persekutuan yang melewati batas parokial ialah negara bahkan persekutuan antar umat manusia. Dalam hidup bersama itu akan berkembang rasa solidaritas yang mewujudkan persatuan. Beberapa bentuk persekutuan hidup yang secara langsung berhubungan dan mengatur kehidupan dalam mewujudkan kesejahteraan bersama adalah negara. Dalam negara itulah persatuannya sangat kompleks karena rakyatnya terdiri dari berbagai kelompok etnis, agama, kebudayaan. Oleh karena itu persatuan dalam negara membutuhkan pembinaan yang betul-betul tangguh dan ulet, sekaligus sebagai syarat untuk tetap tegaknya negara dan bangsa. Dalam hubungan ini, pembinaan untuk

mewujudkan ketangguhan dan keuletan tidak hanya menyangkut aspek potensi alamiah yang ada dalam negara, seperti sumber alam tetapi juga menyangkut potensi sosial budaya maupun manusia (penduduk). Disinilah jiwa dan semangat nasionalisme segenap penduduk menjadi penting untuk dimiliki dan dibina secara terus menerus baik dalam kondisi damai maupun dalam kondisi emergensi. Pembinaan jiwa, semangat nasionalisme sudah semestinya tidak mengenal ruang dan waktu, terutama dalam kondisi perkembangan zaman yang mengglobal, kondisi kesadaran berbangsa dan bernegara bagi penduduk (warga negara) terutama generasi penerus yang tidak mengalami perilaku sejarah bisa mengalami penurunan. Hal ini dipertegas oleh Lembaga Pertahanan Nasional (Sumarsono dkk, 2001, hal.2) bahwa nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia dalam perjuangan merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan telah mengalamai pasang surut sesuai dengan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu dalam alam kehidupan yang serba mengglobal seperti sekarang ini semangat perjuangan bangsa harus tetap dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia untuk mewujudkan eksistensi negara dan bangsa. Sebagaimana kita ketahui negara dan bangsa Indonesia yang bersifat majemuk, menempati wilayah yang berpulau-pulau masing-masing memiliki karakteristik sesuai dengan kondisinya. Maka dari itu kesadaran nasional harus terus dibina untuk mewujudkan nasionalisme Indonesia, yakni nasionalisme yang dapat mengatasi segala paham golongan maupun segala paham perorangan.

Nasionalisme atau kebangsaan akan tumbuh dan berkembang didorong oleh adanya kesamaan-kesamaan dalam hal tertentu, seperti agama, bahasa, budaya, keturunan, kepentingan, cita-cita, ideologi dan mungkin peradaban. Akan tetapi hal-hal tersebut bukannya menjadi satu-satunya faktor pendukung lahirnya jiwa dan semangat nasionalisme, paling tidak menjadi faktor penyebab dan menjadi ciri yang dimiliki oleh persekutuan hidup tersebut, seperti bangsa Indonesia. Meskipun bukan sebagai satu-satunya faktor pendukung, diakui hal-hal yang disebutkan di atas tetap mempunyai peran penting bagi lahirnya jiwa dan semangat nasionalisme, dalam arti mempercepat proses tumbuhnya semangat nasionalisme.

Teuku Ibrahim (dalam jurnal Filsafat Pancasila, Desember 1998: 29) menegaskan bahwa kemauan yang sama yang lahir sebagai akibat adanya pengalaman bersama (dalam sejarah) pada dasarnya dianggap sebagai faktor pendorong yang

menumbuhkan nasionalisme. Oleh karena itu perlu dibedakan nasionalitas dari nasionalisme. Penulis yang sama menyebutkan Nasionalitas adalah kesadaran akan adanya karakteristik atau kesamaan-kesamaan nasional dan nasionalisme adalah loyalitas yang tinggi terhadap nasionalitas itu yang umumnya diwujudkan berupa loyalitas terhadap *nation-state*. Sejalan dengan adanya pengalaman dalam sejarah, nasionalisme merupakan gejala sosial politik yang berkembang secara dialektik, berakar di masa silam serta tumbuh dan berkembang yang akhirnya terwujud semangat persatuan dengan dasar cita-cita hidup bersama dalam satu negara nasional (Noor Ms Bakry, 2010: 84). Dengan demikian nasionalisme sebagai paham kebangsaan ada dua hal yang menjadi dasar perwujudannya, ialah kenangan masa lalu dalam hidup berbangsa dan kehendak untuk bersatu dalam hidup bernegara. Kenangan masa lalu terwujud dalam waktu yang lampau dan kehendak untuk bersatu terwujud dalam waktu sekarang. Karena itu nasionalisme sebagai gejala sosial politik berhubungan erat dengan negara sebagai organisasi politik dan kekuasaan serta sekaligus menjadi alat perjuangan untuk mewujudkan cita-cita .

Berkaitan dengan dua hal yang menjadi dasar perwujudan nasionalisme, berarti nasionalisme mempunyai akar yang dalam di masa lampu, dalam mana kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya nasionalisme, seperti rasa senasib, sepenenderitaan, kesamaan cita-cita, tujuan atau kepentingan telah matang dan kemudian berkembang pada suatu saat tertentu sebagai kesatuan, yakni jiwa dan semangat persatuan untuk hidup bersama dalam satu negara merdeka sebagai ruang hidup. Dalam kondisi seperti ini, aspirasi nasionalisme adalah perjuangan untuk mewujudkan persatuan nasional dalam bidang politik dan tumbuh berkembang serta bermuara dalam bentuk negara nasional yang kemudian membentuk negara bangsa (*nation-state*). Sebagaimana pada bangsa Indonesia, nasionalisme sebagai konsep kebangsaan berupa cinta tanah air dan bangsa, awalnya dalam bentuk sederhana dan mempunyai lingkup kedaerahan, kesukuan, ialah perlawanan anti kolonial atau bentuk penolakan lainnya. Cinta tanah air dan bangsa menegaskan adanya penghargaan tinggi akan kebersamaan yang luas (solidaritas). Dalam kondisi solidaritas yang terbangun tersebut mengakui hak dan kewajiban asasi sesamanya tanpa membedakan suku, keturunan, agama dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. Dengan demikian esensi nasionalisme sebagai suatu tekad bersama yang tumbuh dari bawah

untuk bersedia hidup sebagai suatu bangsa dalam negara merdeka.

Konsep cinta tanah air dan bangsa pada bangsa Indonesia baru tumbuh dan berkembang oleh kaum terpelajar hasil pendidikan Barat abad 20, ialah diterapkannya Politik Etis oleh pemerintah kolonial untuk penduduk jajahan. Meskipun Politik Etis pelaksanaannya masih berpijak pada sistem stratifikasi sehingga tidak semua penduduk jajahan dapat mengikutinya, namun satu akibat yang tidak sengaja dari Politik Etis ialah lahirnya masyarakat terpelajar pada sebagian penduduk jajahan. Hal ini merupakan akibat yang cukup jauh yang tidak diperhitungkan oleh pemerintah kolonial dari tujuan Politik Etis itu sendiri, ialah terpenuhinya tenaga terdidik murah dari penduduk jajahan. Dari para terpelajar, bibit nasionalisme bersemi yang kemudian mendorong lahirnya gerakan nasional dan berkembang menjadi perkumpulan kepemudaan, seperti Jong Java, Jong Sumatra, Jong Ambon dan sebagainya.

Konsep nasionalisme tersebut agar dapat memberi manfaat dan hasil konkrit bagi bangsa Indonesia, maka perlu instrumen yang dapat mendukung, ialah organisasi yang teratur dan modern. Kesadaran akan perlunya organisasi menjadi motivasi kuat untuk mewujudkan ide nasionalisme, sehingga kemudian lahir organisasi sosial politik, seperti Budi utomo, Serikat Dagang Islam, *Indische Partij*. Organisasi sosial politik tersebut menjadi organisasi yang mempunyai corak tegas dan radikal, ialah Indonesia merdeka. Dari sinilah konsep kebangsaan (nasionalisme) terus mencapai kedewasaan dan aktivitas gerakannya menjadi lebih tegas dan radikal, ialah terbentuknya negara nasional lepas dari ikatan penjajah (kolonial).

D. Nasionalisme sebagai Potensi Eksistensi Bangsa dan Negara

Hampir semua bangsa bernegara di dunia memiliki suatu sifat yang tidak bisa dipungkiri ialah pluralistik, oleh karena itu kemajemukan bangsa tidak hanya menjadi milik satu negara, terutama bangsa Indonesia yang sudah diakui sebagai bangsa yang majemuk. Kondisi pluralisme di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dialami oleh berbagai negara di dunia. Negara yang pluralistik akan dihadapkan pada tantangan yang sama, yakni bagaimana mempertahankan kelangsungan hidup, keutuhan dan mencegah terjadinya disintegrasi. Karena itu oleh

organisasi negara diperlukan berbagai strategi untuk mewujudkannya. Upaya yang ditempuh, ada yang mencoba melawan pluralisme dengan menerapkan sistem pemerintahan yang otoriter dengan kekuasaan yang terpusat pada pemerintah pusat, bahkan bisa dalam bentuk penghilangan etnis atau membatasi pertumbuhan penduduk pada etnis tertentu. hal itu dilakukan semata-mata untuk mempertahankan negara kesatuannya (Moeljarto Tjokrowinoto, op.cit: 39). Sementara ada negara yang lebih memanfaatkan nasionalisme sebagai faktor pengikat untuk meneguhkan persatuan dan kesatuan sebagai bangsa seperti bangsa Indonesia. Politik pecah belah yang diterapkan kolonial atas bangsa Indonesia sangat efektif bagi kolonial untuk mempertahankan kekuasaannya. Penolakan penduduk jajahan yang dilakukan dalam bentuk perlawanan (pemberontakan terhadap pemerintah kolonial) selalu tidak berhasil meskipun perlawanan tersebut terjadi di berbagai wilayah jajahan. Ketidak berhasilan tersebut dimungkinkan bukan karena ketidakmampuan penduduk jajahan, tetapi karena tidak adanya kebersamaan (koordinasi) para tokoh-tokoh nasional dalam melakukan perlawanan. Disamping itu, penolakan dilakukan lebih dalam bentuk perlawanan fisik yang secara teknologi penduduk jajahan jauh di bawah teknologi kolonial, sehingga dengan mudah dapat dipatahkan oleh pemerintah kolonial.

Sifat kemajemukan bangsa secara ideologis dapat menjadi suatu faktor yang menghambat terwujudnya kesatuan, tetapi dengan kesadaran yang dibangun oleh bangsa itu sendiri untuk hidup dalam satu kesatuan dengan semangat solidaritas dapat membatasi dari jauhnya kesatuan bangsa. Semangat solidaritas yang akhirnya mengalir ke dalam bentuk kesatuan menjadi modal penting terwujudnya satu bangsa yang utuh meskipun di dalamnya majemuk, sebagaimana disebutkan di atas bahwa kesamaan pengalaman sejarah menjadi satu faktor pendorong semangat solidaritas. Seperti ditegaskan oleh Moeljarto, rasa senasib sepenanggungan telah menumbuhkan kohesi dan solidaritas dari subkultur yang bermuara pada tekad untuk membentuk negara yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Sejarah Bangsa Indonesia telah mencatat bahwa kesadaran bersatu untuk membentuk negara merdeka, bersatu dan berdaulat didorong oleh adanya deskriminasi politik oleh kolonial, hak-hak kewarganegaraannya kurang mendapat posisi sebagaimana mestinya, kekuatan kolonial telah mengeksploitasi baik ekonomi, budaya yang berasal dari bumi tanahnya sendiri dan mentransfernya untuk kepentingan

kolonial, bahkan di sisi lain bangsa Indonesia telah menjadi warga negara kelas dua di negaranya sendiri.

Dalam hal ini nasionalisme adalah faham yang menciptakan dan mempertahankan sebuah negara dengan mewujudkan suatu konsep identitas bersama untuk warga negara. Ikatan ini terjadi dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat saat warga masyarakat mulai memikirkan hidup bersama dalam satu wilayah tertentu, ialah negara yang tidak lagi berada di bawah kekuasaan bangsa lain. Identitas bersama sudah tentu harus disepakati bersama yang mewujudkan suatu kondisi di mana berbagai pihak dalam masyarakat itu bisa saling berinteraksi saling beraktualisasi, sehingga membentuk suatu kesamaan tekad dan kepentingan, ialah hidup bersama dalam satu wadah negara. Identitas bersama yang disepakati bersama dalam konteks nasionalisme merupakan *culture core* yang mampu mengikat berbagai subkultur dalam satu kesatuan entitas politik, ialah negara, dan dalam negara Indonesia *culture core* itu adalah Pancasila. Di dalam mana Pancasila yang nilai-nilainya diangkat dari akar budaya bangsa tidak memihak salah satu budaya masyarakat yang paling maju sekalipun. Pancasila telah menempati diri sebagai kesepakatan nasional dan sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, oleh karenanya mampu mengatasi segala paham perseorangan dan segala golongan serta diterima oleh seluruh lapisan masyarakat bangsa Indonesia. Dengan kata lain asumsi dasar menjadikan nasionalisme sebagai tumpuan eksistensi suatu negara bangsa menuntut adanya suatu *culture core* yang disepakati bersama (Moeljarto Tjokrowinoto, op.cit: 40).

Kita pahami bahwa yang namanya Indonesia, terdapat berbagai suku yang mendiami kawasan dalam lingkungan pulau-pulau. Masing-masing terisolasi dari yang lain karena faktor alamiah, sehingga mengakibatkan hubungan antar pulau menjadi tidak mudah. Kondisi ini mendorong tumbuhnya ciri kesukuan (primordial), kebahasaan, kebudayaan yang terpisah-pisah sehingga memunculkan sifat khas masing-masing menurut lingkungannya. Dalam kondisi yang berbeda-beda itu, nasionalisme tumbuh ditandai adanya perasaan kebangsaan dan kesamaan nasib. Yang di jaman penjajahan ditandai dengan adanya pemberontakan-pemberontakan di beberapa daerah jajahan yang dilakukan tokoh-tokoh nasional dengan tujuan melepaskan diri dari penjajah. Nasionalisme pada diri bangsa Indonesia tidak tumbuh secara instan, tetapi

terbentuk melalui pengalaman sejarah panjang bangsa Indonesia, di mana kondisi masa lalu dalam sejarah, menjadi tumpuan akan adanya jiwa dan semangat nasionalisme yang kemudian berwujud dalam jiwa kepahlawanan dan patriotik. Dapat dikatakan bahwa kesamaan pengalaman sejarah masa lampau telah membentuk kesadaran sejarah untuk tetap berada dalam entitas politik di masa depan, yakni keinginan untuk hidup bersama dan keinginan untuk eksis bersama.

Eksistensi bangsa dan negara Indonesia tidak bisa dipisahkan dari semangat dan jiwa kebangsaan bangsa Indonesia baik sebelum dan selama pejajahan yang kemudian berlanjut pada masa mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Masa-masa perjuangan tersebut menimbulkan kondisi dan tuntutan yang berbeda-beda, namun bangsa Indonesia dalam menanggapi tuntutan dan kondisi yang berbeda itu tetap berdasarkan nilai-nilai perjuangan, ialah jiwa, semangat dan tekad kebangsaan. Dalam kenyataannya nilai-nilai perjuangan itulah yang mampu mengantarkan bangsa Indonesia mewujudkan negara nasional. Semangat perjuangan yang diistilahkan tidak kenal menyerah, dilandasi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan YME serta keiklasan berkorban telah terbukti mampu mempertahankan kemerdekaan 17 Agustus 1945. Di sisi lain semangat perjuangan bangsa merupakan kekuatan mental spiritual yang dapat melahirkan sikap, perilaku heroik dan patriotik. Oleh karena itu semangat perjuangan itu harus tetap dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia meskipun dalam dinamika kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat bisa mengalami pasang surut. Selain itu, sebagai warga negara harus tetap memiliki wawasan dan kesadaran bernegara, sikap dan perilaku cinta tanah air, mengutamakan kesatuan dan kesatuan. Yang semuanya itu semata-mata demi tetap tegaknya negara dan bangsa.

E. Nasionalisme dalam Tokoh Tripama

Serat Tripama yang berisi tujuh bait secara prinsip merupakan suatu gambaran kesatriaian yang dimiliki oleh tokoh Sumantri, Kumbakarna dan Basukarna dalam pewayangan yang bisa dijadikan teladan oleh para prajurit untuk diterapkan dalam pengabdian. Sebagai prajurit dalam menjalankan pengabdian harus memiliki sifat, sikap dan perilaku yang tegas tidak ragu dan cenderung patuh pada perintah. Prinsip keprajuritan ini sebagaimana

digambarkan Paku Buwana IV yang tertuang dalam Serat Tripama dan ditegaskan juga dalam Wulangreh pada bait-bait sekar Megatruh.

“wong ngawula ing ratu luwih pakewuh, nora kena minggrang-minggring, kudu manteb sartaipun, setya tuhu maring gusti, dipun miturut sapakon. Mapan ratu kinarya Wakil Hyang Agung, marentahken hukum adil, pramila wajib den emut, kang sapa kang anut ugi, mring parentahe sang Katong. Aprasasat mbadal ing karsa Hyang Agung, mulane babo wong urip Saparsa ngawuleng ratu, kudu eklas lair batin, aja nganti nemu awoh. Ing wurine yen at durung tuwayuh, angurta aja ngabdi, becik ngidunga karuhun, aja age-age ngabdi, yen durung eklas ing batos ...” (Sri Mulyono, 1978: 91).

Terjemahan secara bebas: Bila seseorang akan mengabdikan kepada pemerintah jangan sampai setengah-setengah, harus mantap, setia kepada pimpinan, melaksanakan segala perintahnya. Pimpinan itu lambang Wakil Yang Maha Kuasa sebagai pengatur jalannya peraturan negara, oleh sebab itu harus ditaati perintahnya. Bila tidak dikatakan sebagai pembangkang, menjadi prajurit itu harus berlandaskan itikad baik, ikhlas lahir batin. Bila tidak ikhlas, lebih baik menganggur saja tidak usah mengabdikan diri, bebas semaunya...

Sikap perilaku tokoh Tripama yang dapat ditauladani menggambarkan bahwa Sumantri adalah tokoh yang energik, berkekuatan, cerdas, konsekuen dan berbangga diri. Kemampuan itu diperolehnya atas bimbingan dan pendidikan ayahnya yang seorang pendeta sakti, ialah Suwandagni (Suwandageni). Melalui bimbingan dan asuhan Suwandagni menjadikan dirinya seorang yang berbobot, berkualitas dan memiliki wawasan luas meskipun kesehariannya hidup dalam lingkungan pertapaan. Dengan wawasan dan kemampuannya ia menjadi seorang satria yang berguna dalam hidup. Untuk itulah setelah dirinya merasa cukup kedewasaan sebagai satria, memutuskan melamar pekerjaan di kota menjadi bala tentara (prajurit) kerajaan. Berbekal kemampuannya ia dapat mencapai tataran yang cukup tinggi (bahkan tertinggi) dalam lingkungan keprajuritan, ialah menjadi seorang perdana menteri (dalam hal ini ialah patih). Tokoh Karna (Basukarna), tokoh yang memiliki sejarah hidup yang kompleks, dari dibuang oleh ibunya sampai

kemudian menjadi seorang senopati dalam perang. Ia tokoh yang memiliki sifat keras, tegas dan teguh dalam memperjuangkan prinsip hidup. Dalam perang hidup mati Baratayuda tetap konsekuen memegang teguh kesatriannya berperang pada pihak Kurawa melawan saudaranya sendiri seibu, ialah Pandawa. Keberpihakan pada Kurawa menunjukkan komitmennya sebagai seorang satria yang telah mendapat posisi sosial sangat strategis dari Kurawa, ialah Doryudana. Oleh karena itu meskipun telah dibujuk oleh ibunya (Kunti) dan Kresna dengan berbagai petunjuk dan fakta agar bergabung dengan Pandawa dalam perang hidup mati, namun ia tetap teguh pada pendiriannya untuk berada pada pihak Kurawa meskipun ia tahu Kurawa berada pada pihak yang kurang benar. Sikap keras dan teguh ini bukan tanpa alasan dan kebijaksanaan, tetapi sudah menjadi keputusan hati nurani. Sementara tokoh Kumbakarna meskipun secara lahiriah ia raksasa tetapi memiliki kepribadian yang luhur, idealis dalam mana masalah kebenaran menjadi sangat penting untuk selalu dikedepankan, tidak mau terjebak oleh sifat *serakah* maupun *tidak pamrih* terhadap milik orang lain. Dalam perang Ngalengko, dirinya tidak dengan segera menjadi ujung tombak menanggulangi musuh dengan alasan mendukung (*nglabuhi*) kehendak raja Dasamuka (Rahwana) kakaknya sendiri, tetapi lebih pada kebaktiannya pada nusa dan bangsanya. Diceritakan dalam Serat Tripama *“Kumbakarna iku warno diyu, suprandene nggayuh utami duk wiwit perang Ngalengko nglungguhi satriane, ing tekad datan sujud, amung cipto labuh nagari, lan maleh yayah reno, myang leluhuripun, wus mukti aneng Ngalengko, mangke arso rinusak bala kapi, punagi mati ngrono”*. (Sri Mulyono, 1978: 83). Seorang satria mempunyai tugas dan kewajiban mempertahankan dan menyelamatkan negara dan bangsa serta membela segala bentuk keadilan dan kebenaran. Karena itu dalam melaksanakan kewajiban sebagai satria dalam perang sudah tentu tidak mempersoalkan mati atau hidup, senang atau susah, tidak membedakan guru dan murid, saudara, yang ada hanya teman atau musuh dan yang lebih utama adalah menjalankan tugas dan kewajiban, menghindari atau dalam istilah lain lari dari tugas dan kewajiban dikatakan pengecut. Persoalan mati dalam perang merupakan suatu yang terhormat, menjadi pahlawan bangsa sekaligus namanya lebih harum.

Untuk memberikan ulasan jiwa, semangat nasionalisme pada tokoh Tripama diuraikan sebagai berikut.

F. Tokoh Sumantri

Sumantri atau dikenal dengan nama Bambang Sumantri setelah dinobatkan oleh Harjuna Sasrabahu raja Maespati sebagai patih atau perdana menteri dengan nama Suwanda adalah seorang satria keturunan Begawan Suwandagni (Suwandageni). Hidup dalam lingkungan pertapaan di daerah pedesaan (dalam mana pertapaan biasanya di kawasan pegunungan), dalam keadaan aman tenteram dan penuh keharmonisan dan tanggung jawab atas keselamatan lingkungan. Sejak kecil ia dididik (*digulang*) dengan berbagai pengetahuan tentang hidup utama, keprajuritan termasuk olah senjata, ilmu kesaktian (*kawijayan*) oleh ayahnya. Sehingga ia menjadi pemuda yang memiliki kemampuan bidang keprajuritan dan kesaktian yang lebih dari kebanyakan orang. Pada satu sisi kondisi inilah menjadikan dirinya semakin percaya diri dan menjadi motivasi kuat untuk meningkatkan derajat hidupnya di kota, pada sisi lain Suwandagni mendorong agar mengabdikan diri di kerajaan karena sudah dirasa cukup bekal.

Sumantri sejatinya berdarah biru masih ada hubungan darah dengan Harjunasasrabahu raja Maespati. Seiring dengan kemampuan yang telah dimiliki untuk mencapai derajat penting dalam kehidupannya, ia memilih mulai dari jenjang paling bawah, ialah menjadi hamba sahaya (*ngawula* atau *ngenger*) di keraton yang dipimpin Sri Harjunasasrabahu. Bermodalkan kapabilitas dan integritas kepribadian yang baik yang semuanya itu diperoleh karena *panggulawentah* ayahnya, menjadikan ia secara lambat dan pasti memperoleh kepercayaan sang Raja, sehingga akhirnya mendapat kepercayaan dalam jabatan strategis di keraton sebagai perdana menteri (*patih*) bernama Raden Suwanda. Secara politis dan ekonomis jabatan memang menarik, tidak sedikit orang yang dengan sadar memburunya melalui berbagai cara, karena itu kegagalan dalam memburu jabatan bisa berdampak terjerembab ke frustrasi bahkan depresi, di mana jabatan sangat terkait dengan kedudukan, tahta dan bahkan harta.

Dalam pengabdianannya sebagai seorang prajurit kepada raja Arjunasasrabahu dari Maespati digambarkan sangat dilakukan dengan sepenuh hati yang ditunjukkan oleh sikap kesetiannya. Selama menjalankan pengabdianannya dirinya menerapkan tiga sikap yang menjadi pegangan, ialah "*guna, kaya dan purun*". *Guna* berarti memiliki kepandaian, ketrampilan dan ketangguhan yang tidak hanya dalam hal

pengetahuan tetapi juga menyangkut bidang keprajuritan (olah senjata) serta memiliki kesaktian. *Kaya* berarti memiliki harta, kekayaan yang cukup, kecukupan secara materi dalam hidup. Sedangkan *purun* berarti memiliki keberanian, kepercayaan diri, tidak ragu-ragu. Sebagaimana dijelaskan dalam Serat Tripama (Ki Tentrem Warsena .op.cit: 9) "*Lire lelabuhan tri prakawis, guna, bisa xsaneskaring karya, bunudi murih unggule, kaya, sayektinipun, duk bantu prang Manggada nagri, hamboyong putri dhomas, katur ratunipun, purune, sampun tetela, aprang tandhing lan ditya Ngalengka Aji, Suwanda mati ngrana*".

Dalam konteks ini, dengan berbekal kepandaian, ketrampilan dan ketangguhan semua pekerjaan (kewajiban) yang dibebankan diupayakan dapat diselesaikan dengan hasil yang memuaskan dan segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dalam bentuk apapun yang mengancam bangsa dan negara sebisa mungkin diselesaikan dengan tanpa ragu-ragu. Sebagai prajurit (dalam hal ini satria) yang berkewajiban membela nusa dan bangsa serta sebagai bentuk pengabdianannya, apapun hasil yang dicapainya diperuntukkan kepada raja. Sumantri telah berhasil memboyong putri dhomas dalam perang Manggada untuk rajanya Arjunasasrabahu. Hal ini menggambarkan sifat kepribadian sebagai satria yang tidak mengedepankan rasa pamrih meskipun diperolehnya dengan jibaku jiwa raga (*toh nyawa*), dan bukan karena sudah merasa banyak memiliki harta, tetapi semata-mata menunjukkan sikap dan jiwa pengabdian pada bangsa dan negara Maespati. Semangat rela berkorban untuk bangsa dan negara ditunjukkan juga dalam perang Ngalengka ia berani berkorban jiwa dan raga gugur oleh Dasamuka. Keberanian menghadapi Dasamuka semata-mata untuk menyelamatkan bangsa dan negara Maespati (dalam arti kelangsungan hidup kerajaan). Dalam cerita pewayangan sering dimunculkan prajurit-prajurit yang kalah dalam perang lari dari arena peperangan dan melapor kepada sang pemimpin. Hal ini tidak terjadi pada diri Sumantri, apapun konsekuensinya dalam perang adalah tugas dan kewajiban satria.

Tugas dan kewajiban satria dimaksud diantaranya bahwa seluruh kehidupannya dibaktikan untuk kepentingan bangsa dan negara dan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dilandasi rasa penuh tanggung jawab, tangguh tidak bersikap *dholim*, berani mati dalam peperangan serta kukuh dalam pendirian (tidak plin-plan). Inilah jiwa dan semangat rela berkorban yang digambarkan dalam diri Sumantri pada Serat Tripama yang dapat kita petik meskipun tidak secara keseluruhannya.

G. Tokoh Karna

Karna yang dikenal dengan nama Basukarna, Suryaputra merupakan tokoh yang tangkas, cerdas dan berkepribadian baik. Sebagaimana disebutkan oleh KGPAA Mangkunagara IV menengahkan tokoh Karna didasarkan pada aspek, pertama kepribadian yang sangat tahu diri atas kebaikan orang lain yang telah menempatkan dirinya sebagai orang yang terhormat dan serba kecukupan, ialah raja Duryudana. Aspek kedua ialah kecerdasan dan ketangkasan dalam olah senjata, maka tidak keliru ia diangkat sebagai tombak utama (*agul-agul*) dalam perang hidup mati Baratayuda. Aspek kepribadian Karna, ia telah mampu menemukan apa artinya hidup dan bagaimana harus berbuat bagi dirinya terhadap Negara maupun kepada leluhurnya yang telah membesarkan. Dalam menanggapi kehidupan nyata ia mampu melihat, menempatkan persoalan secara hati-hati, mana yang benar mana yang salah. Dalam cerita pewayangan Basukarna adalah profil tokoh wayang yang otodidak, berjuang sendiri tanpa mengandalkan bantuan keluarga. Ia juga menjadi perlambang bagi karakter manusia yang tahu membalas budi, sekaligus rela berkorban demi kebenaran, meskipun harus mengorbankan jiwa, bahkan nama baiknya.

Meskipun ia dilahirkan sedarah dengan Pandawa tetapi ia tahu diri sebagai orang yang dibesarkan dan dihormati sebagai Adipati Awangga bahkan terangkat dari kenistaan sebagai anak seorang kusir (dari lingkungan keluarga miskin atau masyarakat biasa) oleh keluarga Astina menjadikan dirinya tidak mau mengkhianati dan tidak mau lari dari kenyataan hidup yang dialami. Karena itulah ia berpihak pada Astina dalam perang Baratayuda menghadapi Pandawa meskipun itu saudaranya sendiri. Keteguhan hati dan pendirian mencerminkan bahwa ia telah menemukan akunya sendiri dan tidak mudah digoyahkan oleh kondisi apapun. Dalam cerita pewayangan sebelum Baratayuda bagaimana Karna dirayu oleh Kunti ibunya dan Kresna untuk bergabung dengan Pandawa dalam perang Baratayuda. Namun kenyataannya Karna tetap pada pendirinya membela Astina meskipun Astina adalah pihak yang angkara murka. Melalui perjuangan dalam perang hidup mati ia rela mati untuk memenuhi panggilan kesatriannya dari pada disebut sebagai pengkhianat.

Patut dipahami juga bahwa keberpihakan Karna pada Astina adalah merupakan bentuk balas budi pada Raja Duryudana yang telah memberikan kenikmatan hidup keduniaan baik nama, posisi sosial, maupun harta. Dengan kesadaran yang penuh itulah

Karna tidak mau mengecewakan sang Raja Duryudana meskipun dalam hati baiknya demi kemenangan Pandawa menumpas keangkaramurkaan Kurawa. Keberpihakan Karna pada Astina adalah merupakan tanggung jawabnya sebagai warga Astina meskipun dalam cerita wayang disiratkan bahwa ia juga bertanggung jawab untuk membela kebenaran dan melawan kebatilan, dalam mana hancurnya kebatilan (dalam hal ini adalah Kurawa) akan terjadi melalui perang Baratayuda. Melalui perang Baratayuda, ia memenuhi kewajiban kesatriannya untuk mati sebagai tumbal, tebusan atas keberpihakannya pada Kurawa. Kerelaan berkorban jiwa raga sebagaimana telah disampaikan sendiri kepada Kunti maupun kepada Kresna dalam lakon Kresna Duta. Kerelaan berkorban (mati) juga ditegaskan dirinya dengan memberikan pusaka berupa kotang dan anting-anting kepada dewa Indra yang berubah wujud, meskipun ia telah mendapat pemberitahuan dari dewa Surya melalui mimpi untuk tidak memberikan *kotang* dan anting-anting kepada siapapun. Dalam cerita wayang bahwa siapapun yang memakai pusaka tersebut dalam berperang tidak ada yang dapat mengalahkannya. Dengan kata lain, tidak mengurangi jiwa satrianya ia telah merelakan pusakanya diminta oleh Brahmana yang menipu. Hal ini berarti merelakan (menyerahkan) pusaka sama halnya dengan menyerahkan kematiannya kepada dewa penyabut nyawa.

Sebagai cerminan jiwa, semangat nasionalisme yang dimiliki Karna juga dapat ditelusuri dari keterlibatannya dalam Baratayuda, dalam mana menempatkan dirinya sebagai senopati perang merupakan perwujudan sumpah yang telah diikrarkan kepada Kunti maupun Kresna, ialah rela mati untuk Pandawa. Di sisi lain semua prajurit dalam peperangan berusaha memperoleh kemenangan dengan bisa membunuh lawan, tetapi kemenangan bagi Karna bukan karena cara yang licik, hasil tipuan, melainkan kemenangan yang benar-benar (utama). Seperti diceritakan Karna menolak tawaran Hardawalika yang ingin bekerja sama dengannya untuk membalas (bisa membunuh) Arjuna, bagaimana bila Karna menerima tawaran tersebut, pastilah Arjuna yang mati?. Karna sebagai satria, *agul-agul* bagi Kurawa adalah tokoh yang konsekuen terhadap sumpah kesatriannya hingga sampai pada ajal menjemput.

H. Tokoh Kumbakarna

Tokoh Kumbakarna secara fisik seorang raksasa tetapi sisi kepribadian tidak berbeda dengan satria pada umumnya, ialah mengedepankan perilaku

utama berjiwa satria (*hambeg utama*) dan selalu mengupayakan keadaan yang tentram, damai saling menjunjung tinggi semangat solidaritas dan komunikatif. Sebagaimana disebutkan dalam serat Tripama (Sri Mulyono, 1978, hal.83) "*Kumbakarnaiku warno diyu, suprandene nggayuh utami duk wiwit perang Ngalengko nglungguhi satriane, ing tekad datan sujud, amung cipto labuh nagari, lan malih yayah reno, myang leluhuripun, wus mukti aneng Ngalengko, mangke arso rinusak bala kapi, punagi mati ngrono*".

Semenjak Rahwana menculik Shinta dalam sidang-sidang di kerajaan Ngalengka Kumbakarna maupun Wibisana selalu memberikan pandangan yang bertentangan dengan kehendak raja, dalam pandangan kedua tokoh terakhir menyarankan agar Rahwana mengembalikan Shinta kepada pihak Rama. Secara politis dan psikologis pandangan tersebut bukan tanpa alasan, diketahui bahwa Rama adalah titisan Wisnu dalam cerita wayang ia bertugas (mempunyai misi) mewujudkan keadilan dan ketentraman dunia serta menghancurkan tindakan yang menyimpang dari nilai-nilai kemaslahatan (*dur angkara murka*), oleh karena itu tindakan Rahwana sangat membahayakan Ngalengka. Namun apa yang terjadi, pandangan yang bersifat nasehat utama justru mendapat tanggapan yang bertolak belakang, bahkan memandang remeh Rama yang berkekuatan prajurit kera, hal inilah yang menjadikan Kumbakarna masgul, kecewa karena pernyataannya tidak mendapat tempat di hati Rahwana. Sebagai seorang yang berjiwa satria ia tidak melakukan tindakan memberontak kehendak raja Rahwana, melainkan memilih mengurung diri bertapa tidur mencari petunjuk dewa dan tidak mau terlibat dalam persoalan kerajaan terkait dengan tindakan penculikan Shinta.

Sejak terjadinya perang besar Ngalengka dengan Rama banyak prajurit Ngalengka yang mati termasuk tokoh-tokoh penting kerajaan seperti kedua anak Kumbakarna. Kondisi ini menjadikan kekuatan Ngalengka menjadi rapuh dan makin terdesak. Menyadari kondisi yang semakin mengawatirkan sangat diperlukan peran serta Kumbakarna sebagai senopati perang. Namun sekali lagi sesuai dengan sumpahnya yang tidak mau terlibat atas tindakan Rahwana, ia menghadapi prajurit Rawa bukan karena perintah raja (Rahwana) melainkan karena merasa tumpah darahnya telah teraniaya, diinjak-injak oleh musuh (Rama). Dengan kata lain demi kesatuan politik wilayah dan keutuhan bangsa Ngalengka Kumbakarna berjabaku menghadapi kekuatan tentara Rama. Sebagaimana di tegaskan "*olehe gelem mangsah*

yuda, ora amarga Kumbakarna nedya nglabuhi kadange wredha kang atindak nistha ndhustha bojone wong liya, nanging jalaran nedya ndhepani nagara wutah getihe. Kumbakarna banget ora rila nagara warisaning leluhure diicak-icak dening para wanara" (S. Padmosoekotjo, 1981, hal.51). Dalam pandangan Kumbakarna merebut istri orang lain dengan cara menculik merupakan tindakan yang sangat keliru (*nistha*) dan itu bukan tindakan cara satria. Kumbakarna meminta kepada Rahwana agar Shinta dikembalikan dulu kepada Rama dan bila Rahwana berkeinginan memperisteri Shinta ia bersedia merebut dengan cara satria ialah melalui perang. Dalam perang mempertahankan harkat dan martabat sebagai bangsa dan tanah tumpah darah Ngalengka akhirnya Kumbakarna mati sebagai tumbal atas tindakan nista Rahwana. Dalam konteks ini langkah Kumbakarna berperang menghadapi kekuatan Rama merupakan suatu kearifan yang dapat dipakai sebagai tauladan. Dalam serat Tripama dikatakan "*Kumbakarna kinen magut jurit, mring kang raka sira tan lenggana nglungguhi kasatriyane, ing tekad datan urun, amung cipta labuh nagari, lan noleh yayah-reno, myang leluhuripun, wus mukti aneng Ngalengka, mangke arsa rinusak ing bala kapi, punagi mati ngrana*".

I. Kesimpulan

Berorientasi pada uraian pengabdian tokoh Sumantri, Karna dan Kumbakarna dalam keterlibatannya mendukung eksistensi negara dan bangsanya, dilihat dari teori tipologi manusia bahwa tokoh tersebut dapat digolongkan dalam tipologi orang yang terutama dikuasai oleh pikir dan kemauan, dan tidak digerakkan semata-mata oleh nafsu atau hasrat. Kemuliaan keduniawiaan bukan menjadi tuntutan bagi tokoh Tripama, dalam mana secara sosial politik baik Sumantri, Karna maupun Kumbakarna telah menduduki posisi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Karna telah dinobatkan menjadi Adipati di Awangga, Sumantri telah diposisikan sebagai Patih demikian juga Kumbakarna mempunyai posisi strategis di kerajaan Ngalengka. Oleh karena itu pengorbanan jiwa dan raga ketiga tokoh Tripama tidak didasari semata-mata oleh aspek keduniawiaan, tetapi lebih pada panggilan kesatriaan. Tokoh Sumantri yang dengan penuh kesetiaan kepada pemimpinnya (dalam arti negara dan bangsa) melakukan perlawanan sampai titik darah terakhir dengan Rahwana adalah melaksanakan panggilan kesatriaan sebagai tanggung jawabnya disamping kesadaran atas posisinya sebagai perdana menteri

(patih), ialah menjadi benteng terakhir untuk melindungi negara dan bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh hidupnya ditujukan, dibaktikan untuk negara dan bangsa tanpa pamrih dan ia mati dalam menjalankan tugasnya sebagai perdana menteri. Dalam konteks ini ia dapat dikatakan sebagai pahlawan bangsa memerangi angkara murka dan *kedholiman* Rahwana yang pada masa itu tidak ada yang mampu menandingi.

Tokoh Karna secara tegas menyatakan keberpihakan kepada Duryudana (Ngastina) dalam perang hidup mati (Baratayuda) untuk melawan saudaranya sendiri (Pandawa). Keberpihakan tersebut disadarinya bahwa Duryudanalalah yang telah mengangkat harkat dan kemuliaannya sebagai manusia dalam kancah kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu pengabdian kepada Duryudana (Ngastina) tidak setengah-setengah, ia menjadi agul-agul (*tetungguling prajurit*) bagi Duryudana. Pengabdian yang tidak setengah-setengah tersebut ditegaskannya juga kepada Kunti maupun kepada Kresna sebelum perang Baratayuda meskipun ia sadar bahwa Duryudana adalah pihak yang dholim, angkara murka. Dengan keberpihakan itu dalam hatinya semata-mata untuk kemenangan Pandawa, sebab dengan keterlibatannya pada Duryudana dalam Baratayuda akan mengakhiri kedholiman Duryudana, dalam mana Pandawa yang akan unggul dan pihak Duryudana yang akan hancur. Oleh karena itu ia menyatakan dengan tegas kepada Kunti maupun Kresna rela mati untuk Pandawa dan menolak tawaran Kresna untuk dijanjikan menjadi raja Ngastina setelah Baratayuda untuk bergabung dengan Pandawa.

Tokoh Kumbakarna konsisten dengan pendiriannya bahwa sejak prolog perang besar Ngalengka ia berpandangan agar Rahwana mengurungkan niatnya memperistri Shinta yang tidak lain istri Rama. Dalam pandangan Kumbakarna cara yang dilakukan kakanda (Rahwana) mendapatkan Shinta tidak sesuai dengan sifat dan watak satria karena dengan cara menculik tidak melalui perang. Namun karena Rahwana yang telah diliputi rasa cinta yang berlebihan terhadap Shinta apa yang dilakukannya dianggap benar, maka pandangan Kumbakarna tidak mendapat tanggapan yang sehati dengannya. Kekecewaan Kumbakarna membuat dirinya lebih baik mengasingkan diri untuk tidak larut dalam tindakan Rahwana. Mendekati kondisi Ngalengka dipintu kehancuran Kumbakarna melangkah mempertahankan negara dan bangsa bukan karena perintah raja, tetapi demi tegaknya

negara dan bangsa Ngalengka sebagai tanah tumpah darah, sebagai warisan leluhur dan sebagai tempat ia telah menikmati hidup, meskipun ia akhirnya gugur dalam perang sebagai bentuk panggilan kesatriaannya.

KEPUSTAKAAN

- Effendy Zarkasi. 1977. *Unsur-Unsur Islam dalam Pewayangan*. Bandung: Al Ma'arif.
- Idup Suhadi, dkk. 2003. *Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Kanti Waluyo. 2000. *Dunia Wayang Nilai Estetika Sakralitas dan Ajaran Hidup*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kartini Kartono. 1980. *Teori Kepribadian*. Bandung: Alumni.
- KGPAA Mangkoenagara IV. tth. *Serat Tripama*. Katedak Ian Kababar dening Ki Tentrem Warsena, Sukoharjo: Cendrawasih.
- Miriam Budiardjo. 1985. *Dasar Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Moeljarto Tjokrowinoto. 1998. *Nasionalisme Dalam Perspektif Poilitik*. Dalam jurnal Filasafat pancasila No.2, Thn.II. Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila UGM.
- Noor Ms. Bakry. 2010. *Pendidikan Kewarganegeraa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Padmosoekotjo, S. 1981. *Silsilah Wayang Purwa Mawa Carita*. Jilid II, Surabaya: Citra Jaya.
- Rahmad Hadiwijaya. 2011. *Bercermin Dilayar Realita Antar Cerita*. Ciputat Jakarta: Tatanusa.
- Siswomihardjo, Koento Wibisono. 1998. *Wawasan Kebangsaan Dalam era reformasi*. Jurnal Filafat Pancasila No.2, Thn.II. Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila UGM.
- Sri Mulyono. 1978. *Tripama, Watak Satria dan Sastra jendra*. Jakarta: Gunung Agung.

- Sumadi Suryabrata. 1982. *Psikologi Kepribadian*. Jakarta: Rajawali.
- _____. 1978. *Wayang Asal Usul Filsafat dan Masa depannya*. Jakarta: Gunung Agung.
- Sumarsono, S, dkk. 2001. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Teuku Ibrahim Alfian. 1998. *Nasionalisme Dalam Perspektif Sejarah*, Dalam jurnal *Filsafat Pancasila* No.2 Thn.II. Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila UGM.